

**KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM NEGARA
PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M.H.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018M.**

**KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM NEGARA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**HERI IRAWAN
NPM. 1421020181**



Jurusan : Siyasah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018M**

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM NEGARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

**Oleh
HERI IRAWAN**

Pemimpin merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu negara, tentu saja terdapat kriteria tertentu mengenai seseorang yang diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, terlebih tugas yang diemban oleh seorang pemimpin sangatlah berat. Oleh karena itu diperlukan orang yang sangat berkompeten untuk menduduki jabatan ini. Sesungguhnya setiap masyarakat mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, akan tetapi terdapat segelintir masyarakat yang keberadaannya masih dipertanyakan apakah ia diakui atau tidak oleh negara, salah satunya adalah seorang transgender. Untuk itu perlu adanya pembahasan yang mendetail mengenai kebolehan seorang transgender untuk menjadi pemimpin.

Maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan. Bagaimana perspektif fiqh siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender? dan Bagaimana persamaan dan perbedaan antara fiqh siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandang fikih siyasah dan hukum positif terhadap kepemimpinan transgender, serta persamaan dan perbedaan pandangan fiqh siyasah dan hukum positif mengenai kepemimpinan transgender.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang dan kitab fiqh siyasah.

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fiqh siyasah seorang transgender tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, sedangkan dalam hukum positif seorang transgender diperbolehkan menjadi pemimpin. Hal ini karena transgender tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fiqh siyasah, dan juga seorang transgender telah melanggar aturan agama dengan bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada satu pun syarat dan peraturan yang dapat menghalangi transgender untuk menjadi pemimpin. Meskipun hukum dari keduanya berbeda, akan tetapi antara keduanya terdapat beberapa kesamaan. Fiqh siyasah dan hukum positif sama-sama hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian keduanya sama-sama mengakui atas kesetaraan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda, fiqh siyasah bersumber dari al-Qur'an dan hadits, sedangkan hukum positif bersumber dari Barat. Selain itu fiqh siyasah dan hukum positif sama-sama membela hak-hak kaum transgender, akan tetapi fiqh siyasah membela hak kaum transgender sebagai manusia yang harus memperoleh kehidupan normal seperti yang lainnya, sedangkan hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan seksualnya.

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ
الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. (البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Keluarkan mereka (usir) dari rumah-rumah kalian”. (HR. Bukhari)¹



¹Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Lc. No. 5886, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). h. 345

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Yang terhormat dan sangat saya banggakan kedua orang tua tercinta, ayahanda Mukayan dan ibunda Nurwisah, yang selalu berjuang untuk keberhasilanku baik yang bersifat moril maupun materil.
2. Untuk kakak dan ayunda; Maudiana, Aidi Supandi, Anita Mariana, Am.Keb, serta Rina Wijaya, dan Endra Wahyudi, Am.Kep, yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya, agar selalu bersemangat dalam segala hal terutama dalam rangka penyelesaian studi.
3. Untuk Seseorang yang telah menjadi penyemangat dan penghibur dikala penulis lupa dan lalai dalam penyelesaian studi ini yakni Era Puspita.
4. Untuk Rekan-rekan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini telah bersama-sama berjuang dalam suka dan duka.
5. Untuk Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat penulis ditempa menjadi seseorang yang mampu berfikir untuk lebih maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Heri Irawan lahir di Sinar Marga pada, 10 Oktober 1996, sebagai anak bungsu dari 6 (Enam) bersaudara buah cinta dari pasangan ayahanda Mukayan dan ibunda Nurwisah.

Pendidikan formal ditempuh pada tahun 2003 di SD Negeri 1 Sinar Marga dan lulus tahun 2008, pada tahun bersamaan melanjutkan pendidikan di MTs. Negeri 1 Banding Agung hingga lulus pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan setingkat SMA di MAN 1 Banding Agung dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah pada Jurusan Siyash Syari'iyah sampai sekarang.

Pengalaman organisasi, disaat penulis menempuh pendidikan setingkat SMA penulis aktif dibidang keorganisasian sekolah (OSIS) sebagai Ketua priode 2013, serta aktif dibidang olah raga sebagai anggota hingga lulus, adapun untuk organisasi ekstra kampus penulis tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan juga tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Semende (IPMS) wilayah Lampung, serta tergabung pada yayasan Kuntau Semende Indonesia (KUASE-I). Dan selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai seminar/pelatihan yang diadakan di dalam kampus UIN maupun di luar kampus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaannya fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. Selaku Ketua jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staff perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan data, dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Sahabat-sahabatku angkatan Tahun 2014 serta rekan-rekan Mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini. Amin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, 13 Desember 2018

HERI IRAWAN
NPM. 1421020181

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYATHIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	8
 BAB II. KEPEMIMPINAN DALAM FIQIH SIYASAH DAN HUKUM	
POSITIF	11
A. Pengertian Pemimpin	11
B. Hukum Mengangkat Pemimpin	14
C. Syarat-Syarat Pemimpin.....	19
D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin	22
 BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSGENDER	
A. Pengertian dan Sejarah Transgender	27
B. Macam-macam Transgender.....	34
C. Status Sosial Kaum Transgender	35
D. Kepemimpinan Transgender Menurut Ulama	37

**BAB IV. ANALISIS FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF MENGENAI
KEPEMIMPINAN TRANSGENDER**

A. Perspektif Fikih Siyasah Dan Hukum Positif Tentang Kepemimpinan Transgender.	41
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Kepemimpinan Transgender dalam Fiqih Siyasah dan Hukum Positif	42

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai brikut:

1. Kepemimpinan adalah kemampuan memimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial.²
2. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, bersikap atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.³
3. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita cita untuk bersatu, hidup didalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁴
4. Fiqih siyasah adalah, merupakan gabungan dari dua kata yaitu:

318 ²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), h.

³ M dahlan Al-Barry dkk, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya : Arkola), h. 757

⁴ Abdul Rozak, dkk, *pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (jakarta pranemedia group. 2014), h. 120

Fiqih berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerangan potensi akal. Fiqih juga dapat diartikan sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.⁵

Siyasah berasal dari kata *sa-sa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶

Jadi, *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

5. Hukum positif adalah. Segenap perangkat yang memuat peraturan atau rambu-rambu yang mengatur segala bentuk putusan atau penerapannya yang berbeantuk undang-undang.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang yang melakukan perubahan pada dirinya yang berkenaan dengan perilaku ditinjau dari hukum fiqh siyasah dan hukum positif

⁵ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 63.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 3.

⁷ J.b. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 49.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah:

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan perubahan pada dirinya dalam hal perilaku, sehingga oleh karenanya menurut penulis perlu diketahui status hukum kepemimpinannya.
2. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Rasulullah saw sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kedudukan tersebut merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah saw.

Kedudukan suci Rasulullah SAW yang pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci kedua adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan Rasul sebagai seorang hakim yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci ketiga adalah sebagai penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Rasul

adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat.⁸

Akan tetapi apakah Allah swt memerintahkan Rasulullah saw untuk melimpahkan kedudukan-kedudukan itu kepada orang lain sepeninggalNya?. Kedudukan-Nya sebagai nabi, Rasulullah tidak punya pengganti. Sebab ia adalah penutup para nabi. Berbeda dengan dua kedudukan lainnya, yaitu sebagai hakim dan kepala pemerintahan. Kedua kedudukan tersebut tidaklah ikut terkubur sepeninggal Rasulullah saw. karena manusia tetap memerlukan penetapan hukum ketika ada suatu permasalahan dan juga tetap membutuhkan kebijakan- kebijakan seorang kepala pemerintahan guna terbentuknya keteraturan dalam suatu negara.

Allah swt menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandaskan syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.⁹

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan?. Tentu

⁸ Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab *Inna al-Din 'inda Allah al-Islam*, (Jakarta: Sadra International Institute, 2011), h.137.

⁹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al- fikr, tt), h.3

tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin.

Pada dasarnya semua manusia adalah khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya,¹⁰

Tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.¹¹

Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap Muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpinan salah satunya adalah al-Mawardi, yaitu seorang ulama dari Madzhab Syafi'i. Dalam kitabnya *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat*

¹⁰ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer dari *The Islamic Law and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 169.

¹¹ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h. 170

al-Dîniyyah, beliau menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

Pertama, keseimbangan (*al-adâlah*) yang memenuhi semua kriteria. *Kedua*, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. *Ketiga*, pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu. *Keempat*, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. *Kelima*, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. *Keenam*, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh*, mempunyai nasab dari keturunan Quraisy.¹²

Kemudian hal ini juga dituliskan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam kitab *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.¹³ Tentu saja masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat kepemimpinan yang disebutkan di atas.

Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

¹² Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, hal. 6.

¹³ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), h. 548

umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 Universal Declaration of Humans Right (UDHR), kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁴ Undang- Undang No 42 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut.

Ditinjau dari jenis kelamin, Allah swt hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqih disebut sebagai *mukhannats*. Sebagaimana dalam hadits nabi di sebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمَرْجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. (البخارى)

¹⁴ Farida Elfia, dkk, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*, (Diponegoro Law Riview), Vol. I, No. 4, 18 Februari 2015.h.3.

Artinya:“Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Keluarkan mereka (usir) dari rumah-rumah kalian”.(HR. Bukhari)¹⁵

Berdasarkan hadits di atas jika dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan, apakah diperbolehkan bagi seseorang transgender untuk menjadi pemimpin? Hal ini berhubungan dengan apa yang telah terjadi di India yaitu Madhu Bai Kinnar seorang transgender terpilih menjadi walikota tepatnya di Raigarh Chhattisgarh pada tanggal 04 Januari 2015. Ia memenangkan pemilihan umum walikota di daerah tersebut dengan perolehan suara mayoritas sekitar lebih dari 4500 suara.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul “Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif fiqh siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara fiqh siyasah dan hukum

¹⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin. No. 5886, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). h. 345

¹⁶ Novi Christiastuti Adiputri, *Pertama Kali! Transgender Terpilih Jadi Walikota di India*, (Jakarta: Detik News), 06 Januari 2015.

posisi tentang kepemimpinan transgender?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif fiqih siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan fiqih siyasah dan hukum positif mengenai kepemimpinan transgender.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dalam bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fiqih siyasah dan hukum positif dalam kepemimpinan transgender yang secara langsung dapat merespon kenyataan yang terjadi pada masa kini.
- b. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan meyakinkan tentang pandangan fiqih siyasah dan hukum positif terkait dengan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan data sekunder yang relevan

dengan pembahasan ini.¹⁷berdasarkan jenis dalam penelitian ini maka, penelitian ini akan mencari perbandingan hukum, dalam hal ini penulis membandingkan antara fiqh siyasah dengan hukum positif mengenai kepemimpinan kepala negara bagi seorang transgender.¹⁸

2. Sipat penelitian

Berdasarkan sipatnya penelitian ini bersiat *deskriptif analitik*,¹⁹ yang mana dalam hal ini akan mencari fakta-fakta dan data-data berkenaan dengan kepemimpinan transgender menurut fiqh siyasah dan hukum positif,

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh siyasah. Seperti, kitab al- Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah karya al-Mawardi, kitab Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr karya Muhammad Amin bin Umar Abidin, Universal Declaration of Human Rights (*UDHR*), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 011

¹⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 20-21

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan lainnya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu upaya pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹³ Adapun data-data tersebut dianalisis menggunakan metode komparatif, yaitu meneliti dengan situasi atau penomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.²² Pada tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

²⁰ J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h. 112-116

²¹ Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18

²² Juliansyah Noor, *Op.cit.* h. 34

BAB II

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik* dan *Sulthan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum¹, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²³

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata *imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan Shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan *imam* dalam arti yang mengimami Shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata *imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang

²³ Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h.15.

yang memimpin di dalam bidang agama.²⁴

Kata *khalifah* berasal dari kata *al-khalaf* yang berarti *al-badal* yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman Allah SWT:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya: Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. (QS. al-Baqarah : 255)²⁵

Dari sini kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.²⁶

Secara bahasa *amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti

²⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, (Jakarta: SYGMA, 2010), h. 25

²⁶ Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 21.

bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.²⁷ Kata-kata *amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "*dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir*". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai *khalifah* menggantikan Abu Bakar.²⁸

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.²⁹ *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Kata-kata *Sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.³⁰ Seperti di dalam Hadits Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرَهُ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُصْبِرْ فَإِنَّهُ مِنْ خَرَجٍ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةٍ (رواه البخاري)

Artinya : dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. bersabda : Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama). Maka hendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan

²⁷Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), h. 344.

²⁸ A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 59.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus*, h. 428.

³⁰ A Djazuli, *Op.Cit*, h. 60

(raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jahilah (HR. Bukhari).³¹

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja/Kepala Pemerintahan Muslim.³²

2. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Positif

Di Indonesia pemimpin atau kepala negaranya dipegang oleh seorang Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melakukan kewajibannya sebagai Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.³³

B. Hukum Mengangkat Pemimpin

1. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syi'ah serta Murji'ah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu

³¹ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-ikhlas) 1992), h. 367.

³² A Djazuli, *Op.Cit*, h. 61.

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.³⁴ Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sakte Khawarij, yaitu Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.³⁵

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.³⁶

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapatnya. Menurut al-Qurthubi

³⁴ Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 108.

³⁵ *Ibid*, h. 108

³⁶ Djazuli *Op. Cit* h. 108-109

mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.³⁷ Dalil bantahan atas pernyataan al-Asham di atas adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۚ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (QS. al- Baqarah: 30).*³⁸

Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'adah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, "dari kami amir dan dari kalian amir."³⁹

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum

³⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman dkk, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 34

³⁹ Al-Qurthubi, *Op.cit*, h. 589-590

Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib.”

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (*Wajib aini*), tetapi kewajiban kolektif (*wajib kifa'i/fardu kifayah*). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.⁴⁰

Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana *bertaqarrub* kepada Allah. Sebab *bertaqarrub* kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam *taqarrub* yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Op.Cit*, h. 111

tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.⁴¹

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.⁴²

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak

⁴¹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar, dari *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Râ'iy wa al-Râ'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 227.

⁴² Mujar Ibnu Syarif, *Op.Cit*, h. 111

segala sendi kehidupan. Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.⁴³

2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu Oleh Wakil Presiden. Kemudian di dalam Pasal 8 pula menyebutkan :

- a. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- b. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-selambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- c. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

⁴³ *Ibid*, h. 113

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan.⁴⁴

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 di atas, dapat dilihat bahwa posisi seorang Presiden dan Wakil Presiden ini sangatlah penting, karena sebuah negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemegang kekuasaan yaitu Presiden. Bahkan di dalam Pasal 8 menggambarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan sama sekali terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini. Jika jabatan ini kosong harus segera digantikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dan wajib keadaannya.

C. Syarat-Syarat Pemimpin

1. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqih Siyasah

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.⁴⁵ Syarat pemimpin menurut al-Mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu:

- a. *Al-adâlah*.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid.
- c. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.

⁴⁵ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), h. 548.

- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
- g. Nasab dari keturunan Quraisy.⁴⁶

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat:

Pertama: Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan (QS. Ali Imran: 28) karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bias melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan (QS. al-Nisa": 141). *Kedua:* Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan. *Ketiga:* Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. *Keempat:* Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain. *Kelima:* Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar. *Keenam:* Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. *Ketujuh:* Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. *Kedelapan:* Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu

⁴⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Diniyyah*, h. 5.

dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.⁴⁷

2. Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Hukum Positif

Di Negara Indonesia syarat untuk menjadi Presiden tertuang dalam undang-undang No. 42 Tahun 2008 pasal (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai Pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama

⁴⁷ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 164

- 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
 - r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.⁴⁸

D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

1. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyash.
 - a. Dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

tertentu.⁴⁹

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.⁵⁰

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.⁵¹ Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal.

Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrair, Basyar bin Sa"ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. *Kedua:* Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas

⁴⁹ Muhammad Amin, *Op.Cit*, h.369.

⁵⁰ Abu Yala al-Farra ,*al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Fikr, 1994), h.7.

⁵¹ Imam al-Mawardi, *Op.Cit*, h. 6.

fuqaha dan *mutakallimîn* dari penduduk Bashrah.⁵²

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti halnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”⁵³

b. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirkannya.

Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan

⁵² *Ibid*, h. 6.

⁵³ *Ibid*, h. 7.

sepeninggalnya kepada lembaga asyura. Anggota lembaga syura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaimana sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁵⁴

c. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “*Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah*” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, „ini adalah pemimpin” ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”⁵⁵ Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bias menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, h. 10.

⁵⁵ Ibn Taimiyah, *Minhaju al-Sunnah al-Nabâwiyah*, (Baulaq, tp, tt), jld. I, h. 142.

⁵⁶ *Ibid*, h. 141.

2. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Hukum Positif

Mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A, yang menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang mana pasangan tersebut adalah orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah menjadi peserta pemilihan umum. Yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara dari setiap provinsi tersebar maka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun bila tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50 persen suara dari hasil pemilu, maka dilaksanakan pemilihan lanjutan dan yang menjadi kandidatnya adalah dua pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari hasil pemilihan lanjutan tersebut, pasangan yang mendapat suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan.⁵⁷

Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan Presiden dan wakil Presiden secara terperinci dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tertera di dalam Pasal 3 ayat 6. Adapun rangkaian tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimulai dengan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU.

Kemudian dimulailah pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.

Wakil Presiden, setelah itu partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan masa Kampanye, setelah masa kampanye selesai masuklah pada masa tenang. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tahapan terakhir adalah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁸



⁵⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal (3) ayat 6.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSGENDER

A. Pengertian dan Sejarah Transgender

1. Pengertian transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan, tanggungan) atau pemindahan,⁵⁹ dan “gender” yang berarti jenis kelamin.⁶⁰ Secara terminologi transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual organnya.⁶¹ Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysphoria syndrome.⁶²

Transgender dalam bahasa Arab disebut sebagai *Mukhannats*. *Mukhannats* secara etimologi berasal dari kata *khanitsa-khinatsan* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan.⁶³ Secara terminologi *mukhannats* adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak

⁵⁹ Pius A Partanto,dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola,), h. 757.

⁶⁰ *Ibid*, h. 197.

⁶¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 109.

⁶² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 171

⁶³ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 371

geriknya, perbuatan, dan ucapannya.⁶⁴

Tanda-tanda transgender yang bisa dilacak melalui DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), antara lain: perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress, adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia* yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme lainnya.⁶⁵

2. Sejarah Transgender

Istilah transgender baru dikenal sejak tahun 1965 melalui Psikiater John F. Oliven dari Universitas Columbia kala menulis edisi kedua pustaka referensinya yang ditujukan untuk ahli-ahli kesehatan berjudul *Sexual Hygiene and Pathology* pada tahun 1965, menggunakan gugus leksikal *trans+gender* pada bab *Transsexualism* (*Transeksualisme*) bagian *Primary Transvestism* (*Transvetisme Primer*) dengan menulis, “transgenderisme’ *is what is meant*”, karena seksualitas bukanlah sebuah faktor utama dalam transvestisme primer.⁶⁶ Kemudian tokoh pemuka *Crossdressing Virginia Charles Prince* menggunakan istilah tersebut Desember 1969 untuk judul *Transvestia* sebagai judul majalah yang didirikan

⁶⁴ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al- Mukhtâr*, Juz IV, h 69

⁶⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, h. 172.

⁶⁶ Oliven, John F, *Sexual Hygiene and Pathology*, (Amerika: The American Journal of the Medical Sciences, 1965), Vol 250, h. 235.

olehnya untuk para *crossdresser*.⁶⁷

Christine Jorgensen pada tahun 1979 menolak istilah *transsexual* dalam publik serta mengidentifikasi dirinya sebagai seorang *trans-gender* seperti ditulis dalam surat kabar dengan berkata, "gender tidak ada hubungannya dengan siapa kita di atas ranjang, melainkan terhadap identitas."⁶⁸ Pada tahun 1984, konsep dari sebuah "komunitas transgender" telah berkembang dengan *transgender* digunakan sebagai istilah umum.⁶⁹ Pada tahun 1985, Richard Elkins mendirikan "Trans- Gender Archive" di Universitas Ulster.⁷⁰ *International Conference on Transgender Law and Employment Policy* (Konferensi Internasional Hukum dan Ketenagakerjaan Transgender) pada tahun 1992 mendefinisikan *transgendered* sebagai sebuah istilah umum yang luas yang mencakup "transseksual, transgenderis, crossdresser" yang bertransisi.⁷¹

⁶⁷Richard Eknis, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, (Sage Publications, 2006), h. 13-14

⁶⁸Jerry Parker, *Transgender Woman*, (Winnipeg Free Press, 1979), h. 27.

⁶⁹*Ibid*, h. 41

⁷⁰Richard Eknis, dkk, *The Transgender Phenomenon*, (Sage Publications, 2006), h. 13-14

⁷¹Internationals Conference on Transgender Law and Employment Policy

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Authâr* menjelaskan bahwa pada zaman nabi sudah ada transgender dan yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik dan Hinaba. Transgender di zaman nabi ada yang memang asli transgender dan ada yang buatan. Transgender asli pada umumnya tingkah lakunya tidak kelihatan membahayakan kepada kaum wanita. Dan oleh sebab itu istri-istri nabi menganggap mereka (transgender asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat). Meskipun begitu nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida' (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).⁷² Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لَعِبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَحْيِ أُمَّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّاغُوتَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةٍ غَيَّلَانٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتَدْبُرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُنِ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ " (روا البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi saw sedang berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Umayyah, 'Jika Allah membukakan buat kalian Thaif besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, ia seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi saw pun bersabda, "Janganlah orang ini memasuki (tempat- tempat) kalian." (HR Bukhari)⁷³

⁷² Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, (Mesir: Dâr al-Hadits, tt), Juz VI, h. 176

⁷³ Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Juz VI, h. 174.

Istilah waria atau transgender sudah lebih dikenal di Indonesia dibandingkan istilah lesbi dan gay. Istilah tersebut lebih dikenal dan melekat kepada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai perempuan dari pada perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki. Untuk perempuan yang menganggap dirinya laki-laki atau lebih suka bergaya maskulin disebut sebagai tomboy. Sebelum akhir tahun 1970-an kaum transgender sering berdandan sebagai wanita pada malam hari atau di atas panggung teater. Pada era tahun 2000-an banyak transgender yang berkontribusi sebagai ahli kecantikan atau tampil di acara televisi sebagai penghibur.⁷⁴

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini berdampak pada penerapan hukum di Indonesia yang sebagian dari hukumnya bersumber dari syariah dan tentunya tidak berpihak kepada kaum transgender.⁷⁵ Selain bagi kaum transgender hal ini pun berdampak buruk kepada kaum lesbi, gay dan biseksual, yang mana mereka semua tergabung dalam kelompok LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender). Kaum LGBT ini bersama-sama memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang keberadannya selalu didiskriminasi. Mereka semua tidak mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum LGBT di Indonesia untuk mendapatkan persamaan hak seperti warga negara lainnya.

⁷⁴ Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual dan Transgender*, (Depok: tp, 2013), h. 6.

⁷⁵ Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual dan Transgender*, h. 8

Organisasi untuk kaum LGBT pertama di Indonesia adalah Lambda Indonesia yang didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia yang menyatakan dirinya ke publik sebagai seorang gay. Saat ini, organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah Arus Pelangi yang juga didirikan oleh Dede Oetomo. Organisasi ini fokus kepada pembelaan hak-hak kaum LGBT untuk menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat dan penerimaan kaum LGBT di dalam kalangan masyarakat.⁷⁶

Pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, diadakan suatu konferensi internasional. Berbagai ahli hak asasi manusia dan seksualitas dari berbagai negara datang ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk merumuskan prinsip Yogyakarta. Yaitu prinsip-prinsip pemberlakuan hukum internasional atas hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender (*Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to sexual Orientation and Gender Identity*). Beberapa isi dari keseluruhan 29 Prinsip Yogyakarta adalah:

1. Hak untuk hidup, bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk menolak hukuman mati untuk yang memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda dari yang umumnya ada.
2. Hak atas persamaan dan tidak mendapatkan diskriminasi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang didasari oleh orientasi seksual dan gender.
3. Hak mendapatkan perlindungan, bahwa setiap orang memiliki

⁷⁶ *Ibid*, h. 9

hak untuk dilindungi, dengan tidak melihat dari orientasi seksual dan gender.

4. Hak mendapatkan kebebasan dari perbuatan dan hukuman yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat sebagai manusia.
5. Hak untuk bekerja, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi orientasi seksual dan gender. orang tersebut mendapatkan perlakuan buruk karena memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda dari umumnya.
6. Hak kebebasan beropini dan berekspresi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berekspresi, baik itu dari cara tutur kata, berpakaian, nama dan lain sebagainya.
7. Hak mendapatkan keluarga, bahwa setiap orang berhak mendapatkan keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan gender.

8. Hak mempromosikan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan perlindungan dan realisasi Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan gender.⁷⁷Pada tanggal 8 Mei 2008 didirikanlah sebuah pesantren khusus untuk kaum transgender yang bernama Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta. Pesantren ini berdiri atas inisiatif dari Maryani yang sampai saat ini masih berstatus sebagai waria/transgender. Berdirinya Pondok Pesantren ini berawal dari keikutsertaan Maryani dalam pengajian/ mujadahan Al- Fatah yang pada waktu itu masih berlokasi di kawasan pathuk, di bawah bimbingan KH. Haroemlie Harun yang sekaligus nantinya sebagai pendiri dan

⁷⁷ Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to sexual Orientation and Gender Identity.

pembimbing di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis. Pada saat itu dari sekian banyak jamaah hadir, baik laki-laki maupun perempuan hanya Maryani saja yang menjadi waria. Namun itu tidak menjadi halangan untuk Maryani mencari ilmu, di samping juga mayoritas jamaah tidak mempersoalkan kewariannya yang selama ini identik dengan dunia pelacuran dan perilaku menyimpang lainnya.⁷⁸

Beberapa saat setelah aktif mengikuti pengajian KH. Hamroemli Harun, Maryani yang kala itu masih tinggal di kampung Surakarsan, berinisiatif menggelar pengajian di rumahnya, dengan harapan adanya pengajian tersebut dapat mengajak teman-teman wariannya yang lain untuk ikut serta dalam pengajian itu, dan juga sebagai wujud pembuktian pada masyarakat bahwa waria tidak hanya semata-mata hidup dalam dunia pelacuran dan perilaku yang menyimpang lainnya. Pengajian ini berlangsung lancar sampai kemudian terjadi gempa di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang menjadikan kegiatan ini berhenti. Pasca gempa Maryani bersama teman-temannya mendiskusikan untuk membuat Pondok Pesantren khusus bagi kaum waria. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2008 berdirilah sebuah Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis yang merupakan pondok pesantren waria pertama di Indonesia.⁷⁹

⁷⁸ Febri Ayu Choiriyah, *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)*, (Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011), h. 41.

⁷⁹ *Ibid*, h. 45

B. **Macam-macam Transgender**

Menurut Imam al-Nawawi, transgender ada dua macam, *pertama*: orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau berlagak dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, atau gerak-geriknya. Semuanya alami. Allah memang menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender jenis ini dimaafkan, karena dia tidak membuat-buat menjadi seperti itu. Transgender jenis ini disebut sebagai transgender asli. *Kedua*: transgender yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai seorang transgender. Tetapi, dia membuat-buat dan bertingkah laku layaknya perempuan dalam gerakannya, dandanannya, cara bicara, dan gaya berpakaian. Inilah transgender yang tercela. Transgender jenis inilah yang disebut sebagai transgender buatan.⁸⁰

Dari Ibn Abbas Radhiyallaahu anhuma, dia berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا. (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbas berkata: Maka Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan.” (HR. al-Bukhari).⁸¹

⁸⁰ Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987), h. 317.

⁸¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1379 H), h.. 332.

Ibn Hajar berkata dalam *Fath al-Bari*: “Hal ini (laknat) khusus bagi orang-orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang diciptakan dalam kondisi tersebut, maka mereka diperintahkan untuk berusaha keras untuk meninggalkannya (menyerupai wanita atau sebaliknya) dan membiasakan diri (untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau sebaliknya) secara bertahap. Jika dia tidak mau berusaha untuk meninggalkannya dan malah terus menerus dalam kondisinya tersebut, maka celaan hadits ini juga berlaku baginya. Karena terus menerus dalam kondisinya (menyerupai wanita atau sebaliknya) merupakan tanda bahwa dia ridha terhadap hal tersebut.”⁸²

Adapun pendapat yang memutlakkan bahwa orang-orang yang memang diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, seperti pendapat al-Nawawi, maka hal ini dibawa kepada makna jika orang tersebut tidak sanggup untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya dan cara jalan dan berbicara yang seperti wanita setelah dia mengusahakan pengobatan untuk menghilangkannya. Maka kapan saja memungkinkan baginya untuk menghilangkannya namun dia tidak berusaha melakukannya, maka dia berhak atas laknat sebagaimana dimaksud dalam hadits.”⁸³

c. Status Sosial Kaum Transgender

Faktor seseorang menjadi transgender terdiri dari dua faktor, yaitu faktor gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan. Semua itu disebabkan oleh faktor tersebut, karena semua orang yang bersifat transgender tidak menginginkan ini terjadi. Seorang waria pasti berkata bahwa dia tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri seperti wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam. Ia seolah berhasil melepas beban psikologi yang selama ini masih memberatkannya.⁸⁴

⁸² *Ibid.* h.332

⁸³ *Ibid.* h.335

⁸⁴ Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, (Palembang:

Pada umumnya seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak bisa masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandangnya itu tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang transgender masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara misalnya mencari pekerjaan. Mereka pun juga dianggap sampah masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus transgender memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang transgender itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.⁸⁵ Selain itu individu yang mengalami gangguan identitas gender, tidak dapat dikategorikan sehat dalam aspek mental dan kehidupan sosial, sekalipun secara fisik mereka tidak mengalami gangguan atau kelainan apapun. Ini semua disebabkan sebagian terbesar individu transgender tetap menggantungkan diri pada kehidupan malam, maka hal itu menimbulkan satu anggapan bahwa dunia mereka diidentikkan dengan pelacuran. Stigma ini tentu saja akan melahirkan satu pandangan bahwa berbicara manusia transgender dengan sendirinya akan berbicara tentang kehidupan malam pelacur yang sudah pasti akan mempengaruhi status kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.⁸⁶ Sesungguhnya kaum transgender memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia normal lainnya. Tetapi, dikarenakan terdapat adanya penyimpangan perilaku yang mereka perlihatkan, mengakibatkan mereka mengalami

Univ.Sriwijaya, 2010), h. 9

⁸⁵ *Ibid*, h. 9

⁸⁶ Dwi Putri Prarendrawati, *Aspek Kejiwaan Kaum Transgender dan Transeksual*, Februari 2013, h. 3

berbagai bentuk konflik baik yang mereka dapatkan dari pihak keluarga maupun dari segelintir masyarakat dikarenakan sudut pandang yang telah terbentuk selama ini mengindikasikan bahwa kaum mereka merupakan kaum yang selalu terlibat dalam hal negatif.⁸⁷ Padahal seorang transgender memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dengan warga negara yang normal. Hak Asasi Manusia tersebut tidak boleh dihilangkan karena dia berbeda dengan yang lain atau dianggap berbeda. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dibawa sejak dia lahir. Selain itu juga, sebagai warga negara pelaku transgender bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki status jenis kelamin yang normal berkewajiban membangun negaranya dan mensukseskan jalannya pembangunan negara.⁸⁸

C. Kepemimpinan Transgender Menurut Ulama'

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.⁸⁹ Syarat pemimpin menurut al-Mawardi terbagi menjadi tujuh yaitu:

- a. Al-adâlah.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid.
- c. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang

⁸⁷ *Ibid*, h. 7

⁸⁸ *Ibid*, h. 11

⁸⁹ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al- Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), h. 548.

membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.

g. Nasab dari keturunan Quraisy.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa transgender tidak dapat menjadi pemimpin berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam pengangkatan pemimpin walaupun secara spesifik tidak di jelaskan laki-laki yang dimaksud dalam syarat pengangkatan pemimpin di atas adalah laki-laki yang memang sifata dan prilakunya sebagaimana laki-laki yang sebenarnya. Namaun dalam pendapat lain di jelaskan bahwa:

Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, Pertama: Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan (QS. Ali

Imran: 28) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ^ط
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali.

Karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bias melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditekakkan (QS. an-Nisa': 141).

⁹⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Diniyyah*, h. 5.

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ
 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

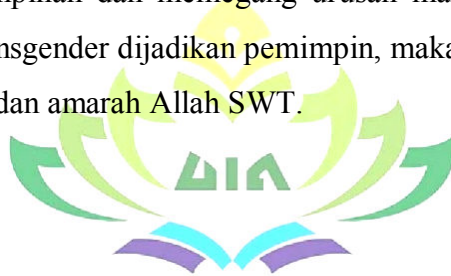
Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Kedua: Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Ketiga: Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. Keempat: Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain. Kelima: Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar. Keenam: Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. Ketujuh: Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. Kedelapan: Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Diturunkan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas.

Jadi tidak berlaku secara umum.⁹¹

Merujuk pada pendapat yang telah di kemukakakn oleh Abdul Qadir Audah di atas bahwa seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena berdasarkan syarat menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki yang sesungguhnya laki-laki secara penampilan maupun sifatnya. Karena pada syarat pemimpin yang kedua adalah laki-laki yang tidak bertabiat seperti perempuan.

Kemudian selanjutnya mengenai kepemimpinan seorang transgender Ibn Taimiyah dengan tegas mengatakan dalam kitab *al-Istiqâmah* “maka barang siapa yang mengagungkan al-Mukhannats dari kalangan laki-laki dan menjadikan untuk mereka kepemimpinan dan memegang urusan maka hal tersebut adalah haram. Jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali laknat dan amarah Allah SWT.



⁹¹ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 164

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF MENGENAI KEPEMIMPINAN TRANSGENDER

A. Perspektif Fikih Siyasaah Dan Hukum Positif Tentang Kepemimpinan Transgender.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua macam jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Hujurat: 13)*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan saja. Pada dasarnya transgender adalah seorang laki-laki, akan tetapi secara kejiwaan ia adalah perempuan.

Nabi SAW menyatakan bahwa laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita hukumnya adalah haram dan dilarang oleh agama. Hadits menegaskan: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari).*

Dalam konteks kepemimpinan bagaimana mungkin seorang transgender dapat menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan bertingkah laku seperti perempuan, sedangkan seorang pemimpin haruslah seorang yang dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya. Seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena perbuatannya tersebut

merupakan perbuatan yang dilaknat dan tidak pantas dicontoh dan ditiru oleh masyarakat.

Selain itu untuk menjadi pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, baik yang berlandaskan nash-nash ataupun dalil-dalil aqli. Beberapa ulama telah menetapkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin. Berhubungan dengan hukum kepemimpinan transgender, maka perlu diperhatikan syarat yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Muhammad Amin bin Umar Abidin menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin adalah harus seorang laki-laki, dengan berdalil berdasarkan hadits dari Abu Bakar r.a *“Bagaimana dapat berjaya suatu kaum yang pemimpinnya merupakan seorang perempuan”* (HR al-Bukhari, Ahmad, al-Nasa’i dan Tirmidzi). Hal serupa juga dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, yang menjadikan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat kedua bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Karena wanita menurut tabiatnya tidak cakap untuk memimpin negara, sedangkan jabatan ini sangat memerlukan kerja keras, dan Islam telah melarang pemberian kuasa (wilayah) kepada wanita sesuai hadits di atas.

Sedangkan al-Mawardi tidak menyebutkan secara tegas bahwa syarat menjadi pemimpin haruslah seorang laki-laki. Ini tidak berarti bahwa tidak menyebutkan laki-laki sebagai syarat kepemimpinan berarti selain laki-laki dapat menjadi pemimpin. Karena sesungguhnya syarat laki-laki sudah merupakan sebuah keharusan bagi seorang pemimpin.

Al-Mawardi juga menyatakan di dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabîr*, yang dalam pendalilan terhadap keharusan qadhi seorang laki-laki, al-Mawardi mengatakan bahwa kekurangan perempuan menyebabkan terhambatnya ter-*“akad* wilayah (kekuasaan) sama halnya seperti imam umat. Di sini al-Mawardi mengqiaskan posisi perempuan mengenai qadhi sama halnya dengan posisi perempuan pada urusan negara, yaitu *imam uthma*. Al-Mawardi merupakan ulama yang berpendapat seorang qadhi harus seorang laki-laki. Kalau qadhi saja harus laki-laki tentunya, tidak mungkin al-Mawardi berpendapat seorang *imam al-uthma*, yang membutuhkan sejumlah kemampuan lebih dibandingkan qadhi, dibolehkan dipegang oleh selain laki-laki.

Dengan demikian, melalui uraian pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah syarat penting dalam pemilihan seorang pemimpin. Hal ini tak terlepas dari beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Tetapi perlu diperjelas kembali kriteria seorang laki-laki tersebut, apakah laki-laki yang di maksud di atas adalah laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya, atau berdasarkan sifat kelaki-lakian, atautkah kedua-duanya?.

Sebagaimana ditambahkan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki sifat pemberani agar tidak takut dalam melaksanakan *qishas*, mendirikan *hudud*, berperang dan mengomando tentara. Sifat pemberani pada dasarnya identik dengan sifat seorang laki-laki. Maka dengan adanya tambahan mengenai sifat pemberani, katagori laki-laki yang dimaksud sudah jelas, yaitu laki-laki yang sempurna bentuk fisiknya dan juga memiliki sifat kelaki-lakian yang salah satunya adalah keberanian.

Seorang transgender meskipun pada dasarnya ia adalah seorang laki-laki akan tetapi ia bukanlah laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian, ia adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, dan ini bukanlah laki-laki yang dimaksud dalam syarat tersebut. Oleh karena itu seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin karena ia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama di atas.

Meskipun di dalam Islam seorang transgender tidak diperoleh menjadi pemimpin, akan tetapi ini tidak berarti bahwa Islam telah mendiskriminasi kaum transgender. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syaukani pada zaman nabi sudah ada kaum transgender dan nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida" (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).

Menurut al-Syaukani di antara pertimbangan dikeluarkannya seorang transgender dari rumah dan diisolir atau direlokalisasi karena seorang transgender diduga orang yang tidak punya butuh dan syahwat, tapi ternyata tidak semua demikian keadaannya. Mereka selalu bertingkah polah di hadapan laki-laki

dengan memamerkan aurat dan kecantikannya, padahal itu dilarang kecuali terhadap suami istri. Selain itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau bahaya yang lebih besar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَخَّضَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ فَنُفِيَ إِلَى النَّعِيمِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي مُهِتٌ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ. أَبُو دَاوُدَ 4: 282، 4928

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya dibawa kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang berlagak seperti wanita, dia memberi warna dengan hinna' (quitec) pada (kuku-kuku) kedua tangan dan kakinya. Maka Rasulullah SAW bertanya : "Kenapa orang ini?" Ada sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, orang laki-laki itu berlagak seperti wanita". Lalu diperintahkan (oleh Rasulullah) supaya orang tersebut diasingkan ke Naqi' (suatu tempat di daerah Muzainah, perjalanan dua malam dari Madinah), lalu ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah tidak kita bunuh saja orang itu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang-orang yang shalat". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 282, no. 4928]

Ibnu Taimiyah berpendapat: “Dan harus diyakini bahwa pengasingan tersebut mendatangkan kebaikan yang dituju, yaitu menjauhkan masyarakat dari kejelekannya. Adapun apabila kita dapati diasingkannya dia ke suatu tempat malah menimbulkan masalah baru bagi manusia, maka cukuplah orang tersebut dikurung di satu tempat yang tidak ada orang lain di sana”

Dari keterangan di atas jelas bahwa Rasulullah mengasingkan seorang transgender tidak lain tujuannya adalah untuk merehabilitasi kaum transgender dan juga sebagai upaya untuk mengembalikan transgender pada kodrat asalnya. Selain itu hal ini dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik. Karena tidak diperbolehkan membiarkan kaum transgender tetap berperilaku seperti itu, dan sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin untuk membantu rakyatnya agar dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.

Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas berbuat sesuai kehendaknya. Allah memberikan manusia kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas berbuat apa saja akan tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab. Islam memang berbeda dengan sistem lain. Dalam Islam hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Jika ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia harus dihukum.

Di dalam hadist telah dijelaskan bahwa Allah melarang seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, dan di dalam hadits pun nabi mengasingkan seorang transgender dari masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa pengasingan itu selain merupakan usaha nabi untuk merehabilitasi kaum transgender, tetapi juga merupakan sebuah hukuman bagi orang yang telah melanggar ketentuan Allah dengan menjadi seorang transgender.

Selain itu, bila dilihat dari aspek sejarah kekhalifahan dalam Islam, Islam telah menganut sistem kekhalifahan sejak 632 Hijriyah, yang mana khalifah pertama pada masa itu adalah Abu Bakar Shidiq yang memimpin sejak tahun 632 hingga 634 hijriyah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh khalifah Umar bin Khattab (634-644), Utsman bin Affan (644-656), dan terakhir oleh Ali bin Abi Talib (656-661). Keempat khalifah ini dinamakan *Khulafa"ur Rasyidin*.

Setelah masa *Khulafa"ur Rasyidin* berakhir, dilanjutkan lagi dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad, dan yang terakhir kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir dipimpin oleh khalifah Muhammad VI 1918 – 1923.

Dari masa *Khulafa"ur Rasyidin* yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar Shidiq hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir dipimpin oleh Khalifah Muhammad VI, seluruh khalifah yang memimpin adalah seorang laki-laki dan tidak ada satupun khalifah yang merupakan seorang transgender. Dari sejarah kekhalifahan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam tidak pernah ada seorang transgender menjadi pemimpin. Hal ini karena agama Islam tidak memperbolehkan seorang transgender menjadi pemimpin.

Bahkan mengenai kepemimpinan seorang transgender ini Ibn Taimiyah dengan

tegas mengatakan dalam kitab *al-Istiqâmah* “maka barang siapa yang mengagungkan al-Mukhannats dari kalangan laki-laki dan menjadikan untuk mereka kepemimpinan dan memegang urusan maka hal tersebut adalah haram. Jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali laknat dan amarah Allah SWT.

Perspektif Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Transgender

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak asasi politik. Peraturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal (5), (6). Dalam Pasal 21 UDHR peraturan tersebut berbunyi:

Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Kemudian dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik dinyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan tentang hak untuk dipilih dalam peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa, setiap orang sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa melihat perbedaan fisik, ras, agama dan jenis kelamin. Hak untuk dipilih merupakan hak yang berlaku bagi setiap orang, baik bagi seorang pria, wanita bahkan bagi seorang transgender. Semua peraturan di atas menyebutkan bahwa untuk ikut serta dalam pemerintahan baik untuk memilih atau dipilih merupakan hak seluruh warga Indonesia secara keseluruhan, asalkan ia memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Pasal (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kaum transgender pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Yang membedakan adalah keinginan dan hasrat orientasi seksual saja. Keinginan dan hasrat seksual yang dialami oleh kaum transgender merupakan milik pribadi dari orang tersebut. Perbedaan yang berkaitan dengan orientasi seksual tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang dalam melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap kaum transgender. Seorang transgender yang memutuskan mempergunakan hak politiknya yaitu hak untuk dipilih maka dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh terdapat perlakuan yang membedakan. Kaum transgender berhak untuk menggunakan hak politik yaitu hak untuk dipilih yang setara dengan manusia normal lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia seorang transgender dapat menjadi presiden. Karena tidak ada satu pun aturan yang dapat menghalangi transgender untuk mendapatkan jabatan tersebut. Meskipun demikian, dalam sejarah Indonesia belum pernah ada seorang presiden yang berasal dari kaum transgender.

Persamaan dan Perbedaan Hukum Kepemimpinan Transgender dalam Fiqih

Siyasah dan Hukum Positif

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan fiqih siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan berdasarkan hukum positif seorang transgender dapat menjadi pemimpin. Dari alasan-alasan yang telah dipaparkan baik dalam fiqih siyasah maupun hukum positif, meskipun pada akhirnya hukum yang dikeluarkan dari hasil analisis ini berbeda, akan tetapi terlihat keduanya mempunyai beberapa kesamaan.

Terdapat tiga poin persamaan fiqih siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender, antara lain:

Pengakuan Atas Jenis Kelamin

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama hanya mengakui bahwa jenis kelamin yang diakui itu adalah laki-laki dan perempuan saja. Berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 Allah SWT, hanya menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan. Agama Islam tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin karena pada dasarnya ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai alat kelamin laki-laki. Dengan jiwanya yang menyerupai perempuan, agama Islam tidak membenarkannya, bahkan Islam mewajibkannya untuk berusaha meninggalkan kebiasaannya tersebut dan bertaubat kepada Allah. Setelah kaum transgender dapat kembali berperilaku sesuai dengan organ seks yang dimilikinya, maka ia baru akan diakui oleh agama Islam sebagai satu jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan.

Begitupun di Indonesia yang menganut sistem gender biner, di mana segala peraturan yang mengikat hak dan kewajiban seseorang diatur berdasarkan seks biologisnya. Dengan kata lain, Indonesia masih mengenal jenis kelamin “bukan” gender”. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kondisi ini berlaku mulai dari aspek administratif hingga kehidupan sosial.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seorang laki-laki haruslah maskulin, tampil dengan pakaian laki-laki, dan tertarik pada perempuan. Begitu pula sebaliknya, berbagai kebijakan pemerintah selalu saja diatur berdasarkan laki-laki dan perempuan. Dimulai dari hal yang sederhana, yaitu seragam sekolah. Siswa

laki-laki wajib menggunakan celana dan siswa perempuan wajib memakai rok. Bagaimana dengan siswi yang enggan memakai rok ke sekolah? Sudah pasti tidak boleh masuk sekolah, diberikan bimbingan khusus, dan sebagainya. Sistem gender biner, seksisme, dan heteronormatif ternyata sudah ditanamkan sejak usia dini di Indonesia.

Orang-orang yang tidak berada dalam patokan sistem gender biner tidak mendapatkan perlindungan di Indonesia, karena tidak adanya kebijakan yang mengatur orang-orang yang berada di tengah-tengah, yang memiliki identitas dan ekspresi gender yang berbeda dengan seks biologisnya. Belum lagi masalah di dunia kerja, dalam persyaratan lowongan CPNS tertulis syarat “tidak mengalami kelainan perilaku (transgender)”. Dari sini dapat dilihat bahwa negara seolah melanggar gender biner. Sebagaimana dalam hukum Islam, di Indonesia pun seorang transgender dapat diakui sebagai satu jenis kelamin setelah ia dapat berubah dan berperilaku sebagaimana organ seks yang dimilikinya, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, selain itu di Indonesia seorang transgender bisa juga mendapatkan pengakuan setelah ia melakukan operasi kelamin dan mendapat pengesahan dari pengadilan atas jenis kelamin barunya tersebut, dan ia tidak lagi disebut sebagai transgender melainkan sebagai transeksual. Setelah mempunyai alat kelamin sesuai dengan yang diinginkan dan mendapat pengesahan dari pengadilan, maka dengan sendirinya hak-haknya sebagai warga negara dapat diperoleh. Seperti mendapatkan kartu tanda penduduk baru dengan jenis kelamin baru, diperbolehkan menikah dan menggunakan hak lainnya sebagai warga negara. Akan tetapi butuh biaya yang mahal dan proses yang panjang untuk melakukan operasi kelamin dan mendapatkan pengesahan atas jenis kelamin barunya dari pengadilan. Tentu saja hal inilah yang menjadi hambatan bagi kaum transgender untuk operasi kelamin dan menjadi transeksual agar dapat diakui di Indonesia.

Pengakuan Atas Kesetaraan

Kemudian hukum Islam dan hukum positif sama-sama menganut konsep kesetaraan, yaitu hak persamaan dan kebebasan. Di dalam hukum Islam semua

kaum muslimin mempunyai persamaan dalam hak-hak dengan sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun atau tingkatan, suku, bangsa, dalam batasan-batasan negara Islam, memiliki keistimewaan-keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.* (Q.S al-Hujurat: 10)

Semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan atas seluruh rakyat. Baik terhadap rakyat yang kedudukannya paling rendah dalam negara sampai kepada pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin, dengan derajat atau tingkatan yang sama, dan tidak ada pengutamaan terhadap siapapun. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kalian.* (QS. al-Syuura: 15)

Kemudian di dalam UDHR pasal 2 dijelaskan :

Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, atau paham yang lain, nasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain. Lagi pula, tidak boleh mengadakan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum

atau status internasional dari negara atau wilayah di mana orang tersebut termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.

Baik di dalam hukum Islam ataupun UDHR keduanya mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap manusia, akan tetapi ada perbedaan dari keduanya. Jika hukum Islam memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi Undang-undang tertinggi bagi orang-orang muslim, yang mana Undang-undang tersebut berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang muslim pun berhak menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif yang dianut oleh Negara Indonesia bersumber dari Barat, salah satunya adalah UDHR yang dilahirkan oleh PBB. Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia merupakan buatan manusia, oleh karena itu segala sesuatunya berpusat kepada manusia, sehingga menetapkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang mana hukum tersebut Allah dan Rasul yang menentukan. Sedangkan hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang membuat dan menentukan hukum tersebut.

Pembelaan Terhadap Hak Kaum Transgender

Baik hukum Islam maupun hukum positif, keduanya memang membela hak-hak kaum transgender, akan tetapi hukum Islam membela hak kaum transgender sebagai manusia pada biasanya yang harus mendapatkan kehidupan normal, dan meninggalkan kehidupan menyimpangnya dengan menjadi transgender. Sebagaimana Islam hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, Islam juga tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin tertentu, karena pada aslinya ia adalah laki-laki dan sudah seharusnya ia berperilaku sebagai laki-laki normal. Islam membela hak mereka untuk dapat hidup normal dengan cara membantu mereka meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan bertaubat agar mereka terhindar dari laknat Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan di dalam hukum positif meskipun Indonesia menganut sistem gender biner dengan

hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi tidak diiringi dengan membuat peraturan khusus yang berhubungan dengan keberadaan kaum transgender ini. Indonesia mengakui UDHR yang dilahirkan PBB yang mana di dalam UDHR ini semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Begitupun dalam peraturan lain mengenai hak politik, tidak ada satupun peraturan yang menghalangi transgender untuk menjadi pemimpin. Dari peraturan mengenai hak politik di Indonesia dapat dilihat bahwa hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan gender yang dipilihnya. Mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan manusia normal lainnya, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat dua poin perbedaan fiqih siyasah dan hukum positif tentang kepemimpinan transgender, antara lain:

Pengakuan Atas Kesetaraan

Berasarkan sejarah kekhalifahan bahwa di dalam Islam tidak pernah ada seorang transgender menjadi pemimpin. Hal ini karena agama Islam tidak memperbolehkan seorang transgender menjadi pemimpin. Bahkan mengenai kepemimpinan seorang transgender ini Ibn Taimiyah dengan tegas mengatakan dalam kitab *al-Istiqâmah* “maka barang siapa yang mengagungkan al-Mukhannats dari kalangan laki-laki dan menjadikan untuk mereka kepemimpinan dan memegang urusan maka hal tersebut adalah haram. Jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali laknat dan amarah Allah swt.

Namun tidak demikian dalam hukum positif bahwa, Kaum transgender pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Yang membedakan adalah keinginan dan hasrat orientasi seksual saja. Keinginan dan hasrat seksual yang dialami oleh kaum transgender merupakan milik pribadi dari orang tersebut. Perbedaan yang berkaitan dengan orientasi seksual tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang dalam melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap kaum transgender. Seorang transgender yang memutuskan

mempergunakan hak politiknya yaitu hak untuk dipilih maka dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh terdapat perlakuan yang membeda-bedakan. Kaum transgender berhak untuk menggunakan hak politik yaitu hak untuk dipilih yang setara dengan manusia normal lainnya.

Pembelaan Terhadap Hak Kaum Transgender

Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas berbuat sesuai kehendaknya. Allah memberikan manusia kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas berbuat apa saja akan tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab. Islam memang berbeda dengan sistem lain. Dalam Islam hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Jika ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia harus dihukum.

Sedangkan hukum positif memang bahwa, Seorang transgender yang memutuskan mempergunakan hak politiknya yaitu hak untuk dipilih maka dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh terdapat perlakuan yang membeda-bedakan. Kaum transgender berhak untuk menggunakan hak politik yaitu hak untuk dipilih yang setara dengan manusia normal lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan transgender menurut fikih siyasah dan hukum positif

Dalam fikih siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Allah dan Rasul melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Seseorang yang telah melanggar aturan agama dengan menjadi transgender tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin haruslah orang yang dapat menjadi panutan bagi rakyatnya.

Dalam hukum positif semua orang dapat menjadi pemimpin baik laki-laki, perempuan, bahkan seorang transgender. Dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa seluruh warga negara dapat menjadi pemimpin, itu artinya tanpa terkecuali seorang transgender pun dapat menjadi pemimpin asalkan ia mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Persamaan dan perbedaan fikih siyasah dan hukum positif mengenai kepemimpinan transgender

Di dalam hukum Islam seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan di dalam hukum positif seorang transgender

dapat menjadi pemimpin. Meskipun hasil analisis dari kedua hukum tersebut berbeda, akan tetapi terdapat beberapa kesamaan dari keduanya.

- a. Pengakuan Atas Jenis Kelamin
- b. Pengakuan Atas Kesetaraan
- c. Pembelaan Terhadap Hak Kaum Transgender

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengakui atas kesetaraan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sedangkan hukum positif bersumber dari Barat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa seorang transgender merupakan orang yang menyimpang. Anggapan tersebut akan membuat mereka semakin tertekan. Padahal sebagai sesama manusia sudah menjadi suatu kewajiban untuk saling mengingatkan dan membantu. Dengan demikian, masyarakat seharusnya bisa menjadi salah satu prantara yang berperan sebagai rehabilitator bagi kaum transgender untuk dapat hidup normal.

Dengan cara menghargai mereka dan menunjukkan mereka pada

kehidupan normal yang sesuai dengan kodrat asalnya, perlahan-lahan mereka akan menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani selama ini telah menyimpang dan sesungguhnya mereka dapat hidup dengan normal seperti seharusnya.

2. Kaum Transgender

Tidak ada seorangpun yang ingin dilahirkan sebagai seorang transgender, apa yang dilakukannya hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaannya dan mendapatkan kenikmatan batin. Bagi seorang transgender asli, apa yang dialaminya memang merupakan ketentuan Allah sang pencipta. Akan tetapi ia tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut, ia harus berusaha untuk berubah dengan meninggalkan kebiasaannya bertingkah laku seperti perempuan. Bagi seorang transgender buatan hendaknya ia bertaubat dan meninggalkan perbuatan menyimpangnya serta lebih memilih dan memilah dalam bergaul agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tercela. Meskipun di dalam hukum positif tidak disebutkan larangan untuk menjadi transgender, akan tetapi kaum transgender masih mendapat pandangan negatif dari masyarakat, tentu tidak ada manusia yang dalam hidupnya senang dikucilkan. Oleh karena itu bagi kaum transgender berusahalah untuk merubah diri menjadi manusia yang normal dengan berusaha meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan membiasakan diri bersifat dan berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki.

3. Pemerintah

Pada dasarnya Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Akan tetapi dalam hukum positif belum ada peraturan yang secara tegas membicarakan mengenai kaum transgender. Berbeda dengan hukum Islam, meskipun sama-sama tidak mengakui keberadaan kaum transgender, akan tetapi hukum Islam membuat peraturan yang membatasi hak-hak kaum transgender. Salah satunya dengan melarang kaum transgender menjadi pemimpin. Seharusnya hukum positif pun demikian. Jika Indonesia tidak mengakui kaum transgender sebagai satu jenis kelamin, maka seharusnya dalam memberi syarat bagi seorang pemimpin haruslah jelas. Bahwa pemimpin haruslah seseorang yang tidak mempunyai kelainan gender dari gender yang diakui oleh negara Indonesia. Atau jika transgender diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menjadi pemimpin, maka seharusnya Indonesia mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Dalam hal ini hukum positif terlihat rancu. Karena bagaimana mungkin seseorang yang keberadaannya tidak diakui akan tetapi ia diperbolehkan menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003
- Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984
- al-Farra Abu Yala, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Fikr, 1994
- Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer dari *The Islamic Law and Constitution*, Bandung: Mizan, 1993
- Al-salus ali, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, penerjemah Fathurrahman dkk, dari *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman* terjemahan Ahmad Sobandi dari kitab *Inna al-Din'inda Allah al-Islam*, Jakarta: Sadra International Institute, 2011
- Sunggono bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Prarendrawati putri dwi, *Aspek Kejiwaan Kaum Transgender dan Transeksual*, Februari 2013
- Ahmadi Fahmi Muhammad, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Farida Elfia, dkk, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*, (Diponegoro Law Riview), Vol. I, No. 4, 18 Februari 2015
- Febri Ayu Choiriyah, *Kehidupan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kritis Prilaku Keberagaman di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)*, Skripsi, Salatiga: Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011
- Bahreisy Hussein, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: al- Ikhlas, 1992

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar, dari *al-Siyasah al-Syar'iyah fî Islahi al-Râ'iy wa al-Râ'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005

Ibn Taimiyah, *Minhaju al-Sunnah al-Nabâwiyyah*, Baulaq, tp, tt

Ibnu Hajar Al Asqalani, dkk, *Fathul Baari syarah : Shahih Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Lc. No. 5886, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003

al-Mawardi Imam, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, Beirut: Dâr al- fikr, tt

al-Nawawi Imam, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987

Internationals Conference on Transgender Law and Employment Policy

J.b. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2001

J.Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997

Parker Jerry, *Transgender Woman*, Winnipeg Free Press, 1979

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, Palembang: Univ.Sriwijaya, 2010

Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000

Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, Juz IV, h 69

Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authâr*, Mesir: Dâr al-Hadits, tt

Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr al-Kutub, 2000

Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr al-Kutub, 2000

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014

Syarif Ibnu Mubajir, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Novi Christiastuti Adiputri, 2015, *Pertama Kali! Transgender Terpilih Jadi Walikota di India*, Jakarta: Detik News, 06 Januari 2015.

Oliver, John F, *Sexual Hygiene and Pathology*, Amerika: The American Journal of the Medical Sciences, 1965

Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tt

Richard Ekins, Dave King, *The Transgender Phenomenon*, Sage Publications, 2006

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 2008

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Totok Jumanthoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal (3) ayat 6.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

Yogyakarta principles on the Application of International Human Rights Law in
Relation to sexual Orientation and Gender Identity.

Zahirah Oktrabiul, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum
Hokoseksual, Biseksual dan Transgender*, Depok: tp, 2013

